



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DR. WINARTO HARYADI, M.SI
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN KIMIA
3. NHK : 812998

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **444.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. LAINNYA, UNITED (SEPEDA) SEPEDA MTB DETROIT 7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. LAINNYA, TREK (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



6. LAINNYA, XIAOMI HIMO C20 SEPEDA LISTRIK Tahun 2021,  
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	185.684.668
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	516.656.591
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.846.841.259
III. HUTANG	Rp.	522.685.435
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.324.155.824

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.